

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, (2019), *“Akuntabilitas,transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).”*Akuntansi syari’ah FEBI Universitas Walisongo Semarang.
- Astuti, Titiok Pujidan Yulianto (2016), *“Good Governance Pengelolaan Dana Desa Menyongsong berlakunya Undang-Undang No.6 tahun 2014”*
- Bachtiar A (2010) *“Analisis Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Ekspor”* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- BPK *“UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”* (www.peraturan.bpk.go.id)
- BPS.go.id *“ Kebonsari dalam Angka 2018”*
- BPKP. (2014) *“Panduan pengelolaan keuangan desa”* (www.bpkp.go.id)
- BPKP. (2015) *“Membangun Goodgovernance menuju clean Government”* 2016 .(www.bpkp.go.id)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2015),*Kebijakan dana desa TA 2016* (www.djpk.kemenkeu.go.id)
- Fedrianawati Intan E (2018) *“pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (pada satuan kerja perangkat daerah dikabupaten Ponorogo),* Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Hamid A, (2010). *“Panduan Penulisan Skripsi”* Cetak 1. FEIS UIN Press. Jakarta.
- Humokor A, (2016). *“PeranPemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongdow Utara”* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ratulangi
- Indrawati,Syafi’I, etc(2018), *“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa,dan Kelembagaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)”*
- Indrayani I (2018), *“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Keuangan, dan Tanggungjawab Sosial terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Studi pada Desa – Desa Se-kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”* Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

I Wayan Saputra, *“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, Pada Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014”*

Kompas (<http://mantan.wabup.ponorogo.jadi.tahanan.kompas.com>) diakses 20 februari 2020

Koran Memo (*Korupsi dana desa kades morang dijebloskan lapas - Koranmemo.com*) diakses 20 februari 2020

Kristianten,(2006) *“Transparansi anggaran pemerintah”* Jakarta

Kurniawan, (2005) *“Transformasi pelayanan publik”* Yogyakarta

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, (2000), *“Pengukuran Kinerja Pemerintah”*. Jakarta

Mahmudi,(2015) *“Manajemen kinerja sektor publik(edisi 3)”* Yogyakarta

Madiunkab.go.id (2019) *“Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun”*

Madiunkab.go.id (2020) *“Penyaluran Dana Desa Langsung Transfer ke Rekening Desa”*

Madiunkab.go.id *“Sejarah Kabupaten Madiun”*

Mardiasmo, (2009) *“Akuntabilitas Sektor Publik”* Yogyakarta

Permendagri, (2016), *“Kewenangan Desa”* (www.binapemdes.kemendagri.go.id).

PNPM-MPD, (2007), *“Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan”* (www.pnpm-mandiri.org).

Prasojo, Kurniawan (2008) *“Reformasi birokrasi dan good governance”* Fakultas Administrasi Publik, Universitas Indonesia

Putra,(2017), *“Pengaruh Akuntabilitas Keuangan”* Fakultas Ekonomi, Universitas Riau

Rasul S, (2002) *“Pengintegrasian sistem akuntabilitas kerja dan anggaran”*, Jakarta.

Septivastuti U, (2018) *“Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa”* Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Sholekhan, Moh.(2012) *“Penyelenggaraan Pemerintah Desa berbasis Partisipasi Masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas”* Setara Press, Malang.

Solihin, Dadang (2007) *“Penerapan Goodgovernance disektor publik untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga publik”*

Sugista A Rizky,(2017) *“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa” (studi empiris di Kabupaten Lampung Selatan)*. FEB Universitas Lampung.

Sugiyono, (2013) *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”* : penerbit alfabeta, Bandung

SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Kecamatan Kebonsari)diakses 20 februari 2020

SurabayaBPK (<http://kepala.desa.kranggan.kabupaten.madiun.jadi.tersangka.kasus.korupsi.surabaya.bpk.go.id>) diakses 20 februari 2020

Sumarto (2009), *“Inovasi, Partisipasi, Goodgovernance”*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Sumaryadi, I Nyoman,(2010) *“Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan pemberdayaan Masyarakat”* Jakarta : Penerbit Citra Utama.

Syakrani, syahriani (2009), *“Implementasi otonomi daerah dalam prespektif good governance”* Banjarmasin.

Ultafiah(2017), *“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat”*Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Yustiarini, (2016) “Goodgovernance dalam pengelolaan dana desa”, Denpasar. DAFTAR PUSTAKA

Ardiyanti, (2019), *“Akuntabilitas,transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).”*Akuntansi syari’ah FEBI Universitas Walisongo Semarang.

Astuti, Titiek Pujidan Yulianto (2016), *“Good Governance Pengelolaan Dana Desa Menyongsong berlakunya Undang-Undang No.6 tahun 2014”*

Bachtiar A (2010) *“Analisis Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Ekspor”* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

BPK *“UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”* (www.peraturan.bpk.go.id)

BPS.go.id *“ Kebonsari dalam Angka 2018”*

BPKP. (2014) *“Panduan pengelolaan keuangan desa”* (www.bpkp.go.id)

- BPKP. (2015) *“Membangun Goodgovernance menuju clean Government”* 2016
 .(www.bpkp.go.id)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2015),*Kebijakan dana desa TA 2016*
 (www.djpk.kemenkeu.go.id)
- Fedrianawati Intan E (2018) *“pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah* (pada satuan kerja perangkat daerah dikabupaten Ponorogo), Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Hamid A, (2010). *“Panduan Penulisan Skripsi”* Cetak 1. FEIS UIN Press. Jakarta.
- Humokor A, (2016). *“Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongdow Utara”* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ratulangi
- Indrawati, Syafi’I, etc (2018), *“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)”*
- Indrayani I (2018), *“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Keuangan, dan Tanggungjawab Sosial terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Studi pada Desa – Desa Se-kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”* Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- I Wayan Saputra, *“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, Pada Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014”*
- Kompas (<http://mantan.wabup.ponorogo.jadi.tahanan.kompas.com>) diakses 20 februari 2020
- Koran Memo (*Korupsi dana desa kades morang dijebloskan lapas - Koranmemo.com*) diakses 20 februari 2020
- Kristianten, (2006) *“Transparansi anggaran pemerintah”* Jakarta
- Kurniawan, (2005) *“Transformasi pelayanan publik”* Yogyakarta
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, (2000), *“Pengukuran Kinerja Pemerintah”*. Jakarta
- Mahmudi, (2015) *“Manajemen kinerja sektor publik (edisi 3)”* Yogyakarta
- Madiunkab.go.id (2019) *“Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun”*
- Madiunkab.go.id (2020) *“Penyaluran Dana Desa Langsung Transfer ke Rekening Desa”*

Madiunkab.go.id “Sejarah Kabupaten Madiun”

Mardiasmo, (2009) “*Akuntabilitas Sektor Publik*” Yogyakarta

Permendagri, (2016), “*Kewenangan Desa*” (www.binapemdes.kemendagri.go.id).

PNPM-MPD, (2007), “Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan” (www.pnpm-mandiri.org).

Prasojo, Kurniawan (2008) “*Reformasi birokrasi dan good governance*” Fakultas Administrasi Publik, Universitas Indonesia

Putra,(2017), “*Pengaruh Akuntabilitas Keuangan*” Fakultas Ekonomi, Universitas Riau

Rasul S, (2002) “*Pengintegrasian sistem akuntabilitas kerja dan anggaran*”, Jakarta.

Septiviastuti U, (2018) “*Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa*” Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Sholekhan, Moh.(2012) “*Penyelenggaraan Pemerintah Desa berbasis Partisipasi Masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*” Setara Press, Malang.

Solihin, Dadang (2007) “*Penerapan Goodgovernance disektor publik untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga publik*”

Sugista A Rizky,(2017) “*Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa*” (studi empiris di Kabupaten Lampung Selatan). FEB Universitas Lampung.

Sugiyono, (2013) “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*” : penerbit alfabeta, Bandung

SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Kecamatan Kebonsari)diakses 20 februari 2020

SurabayaBPK (<http://kepala desa kranggan kabupaten madiun jadi tersangka kasus korupsi surabaya.bpk.go.id>) diakses 20 februari 2020

Sumarto (2009), “*Inovasi, Partisipasi, Goodgovernance*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Sumaryadi, I Nyoman,(2010) “*Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan pemberdayaan Masyarakat*” Jakarta : Penerbit Citra Utama.

Syakrani, syahriani (2009), “*Implementasi otonomi daerah dalam prespektif good governance*” Banjarmasin.

Ultafiah(2017), *“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat”* Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Yustiarini, (2016) *“Goodgovernance dalam pengelolaan dana desa”*, Denpasar.

